

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Paradigma pembangunan nasional telah berubah dari kebijakan yang sentralistik menjadi desentralistik. Perubahan ini merupakan konsekuensi logis setelah lahirnya Undang-undang (UU) No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang selanjutnya telah dirubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 34 Tahun 2004.

Pembangunan daerah sebagai bagian dari kegiatan pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari prinsip otonomi daerah. Melalui otonomi daerah, masyarakat di Kabupaten/Kota diberikan kesempatan mengatur diri sendiri melalui *local self government* dan melaksanakan pembangunan sesuai karakteristik daerah (kondisi geografis, sumberdaya alam dan sosial budaya masyarakat) masing-masing. Oleh sebab itu jika setiap daerah berketetapan hati memfokuskan untuk membangun perekonomian daerah, maka tidak ada alternatif lain kecuali membangun perekonomian yang berbasis pada sumberdaya lokal.

Selama pemerintahan orde baru kegiatan pembangunan perikanan di tingkat nasional maupun di tingkat daerah kurang mendapat perhatian, hal ini terlihat bahwa belum adanya departemen atau dinas khusus yang menangani pembangunan perikanan. Pembangunan yang selama ini cenderung berpihak pada pembangunan fisik dan pertumbuhan lebih diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi sumberdaya alam di darat. Pembangunan tersebut kurang memperhatikan pendayagunaan sumberdaya kelautan dan pemberdayaan

masyarakat pesisir yang hidupnya tergantung pada pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir (Dirjen UP3K, 2000)

Kebijakan pengembangan kawasan pesisir yang telah dilaksanakan sejak pemerintah orde baru juga terindikasi masih bersifat parsial dan direncanakan dari atas (*top down*). Hal ini dapat terlihat dari berbagai program pembangunan pesisir yang hanya mementingkan beberapa aspek saja dan belum terpadu, sehingga seringkali kurang atau bahkan tidak mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat lokal. Boleh dikatakan bahwa strategi pembangunan pesisir selama ini masih belum berdasarkan sistem pembangunan partisipatif dan kurang mendayagunakan potensi masyarakat secara terpadu. Dengan demikian kebijakan tersebut tidak dapat dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkannya sehingga sebagian besar masyarakat nelayan masih hidup dalam keadaan miskin. (Dirjen UP3K, 2000).

Pengelolaan sumberdaya perikanan (*fisheries management*) merupakan upaya penting dalam menjaga kesinambungan sumberdaya (*sustainability*). Hal ini dimaksudkan agar tidak hanya generasi sekarang yang dapat menikmati kekayaan sumberdaya, tetapi juga generasi mendatang (Satria, 2002).

Karakteristik sumberdaya alam yang bersifat terbuka (*open acces*), karakteristik wilayah yang berupa lautan, dan karakteristik masyarakat yang berada pada berbagai level sosial-ekonomi membutuhkan pengelolaan yang relatif lebih rumit dan kompleks, dibandingkan dengan pengelolaan sumberdaya alam lainnya. Indonesia dengan wilayah laut yang luas, atau lebih khusus lagi adalah daerah-daerah yang berkarakteristik kepulauan harus mampu menciptakan pengelolaan sumberdaya laut yang tepat.

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu daerah yang memiliki karakteristik wilayah perairan laut lebih dominan dan berbatasan dengan banyak kabupaten, provinsi, atau bahkan negara lain. Kondisi geografis seperti ini sangat rentan akan masalah-masalah kerusakan lingkungan perairan laut terutama oleh aktifitas *illegal fishing*. Keterlibatan semua pihak dalam menjaga kelestarian laut menjadi sangat dibutuhkan, terutama oleh *primery stakeholder* yaitu masyarakat dan pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Strategi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Berbasis Masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Kasus Kawasan Panglima Raja Kecamatan Concong)”.

1.2. Rumusan Masalah

Setelah pembangunan era reformasi dijalankan kegiatan pembangunan perikanan mulai mendapat perhatian oleh pemerintah, hal ini terlihat dari didirikannya Departemen Kelautan dan Perikanan ditingkat nasional serta didirikannya dinas perikanan dan kelautan di tingkat daerah seperti didirikannya Dinas Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Indragiri Hilir .

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana bentuk strategi kebijakan pemerintah yang telah diimplementasikan kepada masyarakat yang diketahui memiliki tujuan untuk mensejahterakan, mampu memberikan hasil dan manfaat yang mestinya dirasakan oleh masyarakat bersangkutan, atau sebaliknya yaitu strategi yang dilaksanakan tersebut hanya menjadi suatu yang tersia-siakan saja. Untuk itu kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dengan strategi yang baik dan mencakup berbagai aspek yang menyeluruh serta terpadu, tidak tertutup

kemungkinan mampu memberikan hasil yang sangat baik bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat baik itu secara langsung maupun tidak langsung

Pengelolaan sumberdaya perikanan (*fisheries resources management*) merupakan upaya penting dalam menjaga kesinambungan sumberdaya (*sustainability*). Namun selama ini pengelolaan sumberdaya laut berpusat pada pemerintah, sehingga dalam prakteknya mengalami kegagalan.

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah dipaparkan di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan penelitian tentang program pengembangan perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir, diantaranya:

1. Bagaimana karakteristik masyarakat atau nelayan di Pesisir Panglima Raja Kabupaten Indragiri Hilir ?
2. Strategi apa saja yang dilaksanakan terhadap pengelolaan sumberdaya pesisir di Kawasan Panglima Raja Kabupaten Indragiri Hilir ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana strategi pengelolaan sumberdaya pesisir di Kawasan Panglima Raja Kabupaten Indragiri Hilir pengaruh terhadap masyarakat, serta memberikan arahan pengembangan secara optimal dan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan kajian terhadap 2 sasaran pokok yaitu:

1. Mengetahui karakteristik masyarakat atau nelayan di kawasan Panglima Raja Kabupaten Indragiri Hilir .
2. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan tentang strategi pengelolaan Sumberdaya pesisir di Kawasan Panglima Raja Kabupaten Indragiri Hilir .

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini diharapkan :

1. Memberikan kontribusi kepada pihak terkait seperti Pemerintah Daerah, Dinas Perikanan, Masyarakat dan seluruh *Stakeholders* dalam pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Indragiri Hilir
2. Sehubungan dengan program otonomi desa di Propinsi Riau dalam mewujudkan Visi Riau 2020 maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada seluruh *Stakeholders*
3. Sebagai gambaran dan referensi bagi pembangunan wilayah pesisir secara nasional terutama pembangunan wilayah pesisir yang berbasiskan potensi dan budaya masyarakat lokal.